

Potensi Pariwisata di Wilayah Pesisir Kabupaten Buleleng, Bali

Retha Pramesti^{1*}, Danang Agung Indriatno², Muthia Redha Fadhilah³, Nanda Athalla Putra⁴, Fadhli Wibisetya Pratama⁵

¹⁻⁵ Universitas Diponegoro, Indonesia
Email: rethapramesti1@gmail.com

Abstract

The coastal area is a space that has potential in various aspects. This coastal area is important to be developed both in the renewable and non-renewable natural resources sector. In practice, Indonesia is still considered unable to utilize and manage coastal area resources. As a result, the potentials they have have not been able to provide optimal utilization in regional economic development. The people of Buleleng in the Province of Bali where most of the population are fishermen also feel the same way. Many fishermen live on the poverty line and until now have not been prosperous due to the small income in their daily livelihood. In this study, the data collection method as well as information used the Analytical Hierarchy Process approach based on SWOT analysis (Strength, Weakness, Opportunity, Threat). The results of the study indicate that there is a need for development both in the economic sector of the coastal area and in community development. The strategy that can be used is to increase technology and specialization so that the coastal areas of Buleleng can compete.

Keywords: Economic Management; Community Development; Coastal Areas

Abstrak

Wilayah pesisir merupakan ruang yang memiliki potensi dalam berbagai aspek. Wilayah pesisir ini penting untuk dikembangkan baik dalam sektor sumber daya alam yang diperbaharui maupun tidak dapat diperharai. Indonesia dalam prakteknya masih dianggap belum bisa dalam memanfaatkan dan juga mengelola sumber daya wilayah pesisir. Akibatnya, potensi-potensi yang dimiliki belum bisa memberikan pemanfaatan yang optimal dalam pembangunan perekonomian daerah. Masyarakat Buleleng yang berada di Provinsi Bali yang mana sebagian besar penduduknya adalah nelayan juga merasakan hal yang sama. Banyak nelayan yang hidup di garis kemiskinan dan sampai sekarang belum sejahtera dikarenakan kecilnya pendapatan dalam mata pencaharian sehari-hari. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana potensi pariwisata wilayah pesisir di kabupaten Buleleng serta bagaimana pengelolaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, data dan juga informasi dipulnkan melalui beragam literatur serta survei. Selain itu penelitian ini menggunakan pendekatan *Analitik Hierarchy Process* yang berbasis analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threat*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlu adanya pengembangan baik dalam sektor ekonomi kawasan pesisir dan pengembangan masyarakat. Strategi yang dapat dimanfaatkan adalah dengan peningkatan teknologi serta spesialisasi agar wilayah pesisir Buleleng mampu bersaing.

Kata Kunci: Pengelolaan Ekonomi; Pengembangan Masyarakat; Wilayah Pesisir

* Corresponding author

Received: October 15, 2022; Revised: October 25, 2022; Accepted: December 21, 2022

A. PENDAHULUAN

Pengembangan merupakan kemampuan untuk meningkatkan kualitas hidup, Kata pengembangan identik dengan keinginan menuju perbaikan kondisi disertai kemampuan untuk mewujudkannya. Sehingga dapat disimpulkan pengembangan merupakan suatu proses untuk mengubah potensi yang terbatas sehingga menimbulkan potensi yang baru untuk meningkatkan kesejahteraan hidup pada suatu wilayah. Salah satu ruang yang memiliki potensi cukup besar dalam pengembangan wilayah adalah pesisir dan laut. Wilayah pesisir memiliki sumber daya alam yang beragam, baik sumber daya yang dapat diperbaharui maupun sumber daya yang tidak dapat diperbaharui. Indonesia merupakan salah satu negara yang sebagian besar wilayahnya berupa wilayah perairan. Indonesia kemudian disebut dengan istilah Negara Maritim. Secara geografis Indonesia terletak dari 6^o LU sampai 11^o LS dan 92^o sampai 142^o BT dengan luas 1.905 juta km² dimana tiga perempat wilayahnya merupakan laut (5,9 juta km²), dengan Panjang garis pantai 95.161 km. Kondisi ini membawa keuntungan tersendiri bagi Indonesia. Sebagai negara kepulauan dengan keanekaragaman hayati laut (*marine biodiversity*) yang tinggi, Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang berlimpah. Khususnya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Hal ini dapat dijadikan modal dasar melaksanakan pembangunan Indonesia. Kawasan pesisir tidak hanya menyediakan sumber daya alam yang produktif seperti terumbu karang, padang lamun (*seagrass*) hutan mangrove, perikanan dan kawasan konservasi, tetapi juga terdapat jasa lingkungan berupa keindahan alam yang dapat menggerakkan industri pariwisata bahari.

Menurut UU nomor 27 tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil, Ruang lingkup pengaturan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil meliputi daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut, ke arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke arah laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai pada saat pasang tertinggi ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. Pengaturan pemanfaatan ruang di wilayah darat kawasan pesisir diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan/atau Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang berlaku. Dengan lahirnya UU tersebut lebih jelas mengakui eksistensi sektor kelautan dan perikanan serta pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai salah satu agenda pembangunan nasional. Namun, fakta menunjukkan pengembangan wilayah pesisir hingga saat ini belum dimanfaatkan secara optimal, padahal tersimpan potensi SDA dan jasa lingkungan yang sangat besar. Sehingga untuk menjadikan sektor kelautan sebagai arus utama pembangunan diperlukan kebijakan pembangunan yang terpadu berbasis ekosistem.

B. METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian kali dilakukan di Pesisir Jumiang, dan Pengembangan Destinasi Pariwisata Bahari. Semua tempat tersebut terletak di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, Indonesia. Data dalam penelitian ini dibagi menjadi data primer dan data sekunder. Data primer diambil dengan menggunakan metode survei langsung di lapangan, kuesioner, dan juga dokumentasi secara *real time*. Sedangkan data sekunder diambil melalui jurnal terdahulu dan website-website resmi terutama yang menyangkut wilayah pesisir Kabupaten Buleleng. Analisis data dilaksanakan dengan beberapa cara, yaitu seperti :

- a. Menelaah dan menyimpulkan data dari berbagai sumber.
- b. Pengamatan secara langsung di lapangan.
- c. Wawancara dengan pihak terkait.
- d. Dokumentasi wilayah pesisir Buleleng secara *real time*.

Data ini nantinya akan dikumpulkan menjadi satu untuk seterusnya disusun berdasarkan *Analytic Hierarchy Process* (AHP). Susunan *Analytic Hierarchy Process* ini dibuat berdasarkan aplikasi Super Decision. Aplikasi ini dapat diperoleh secara *online* pada *website* <https://www.superdecisions.com/downloads/>. *Analytic Hierarchy Process* ini nantinya akan

menjalankan tugasnya yaitu untuk menganalisis persepsi para pemangku kebijakan (*stakeholders*) dalam menentukan skala prioritas dalam pengambilan keputusan terutama dalam strategi pengelolaan wilayah pesisir dan laut Buleleng. Setelah *Analytic Hierarchy Process* ini membuahkan hasil, informasi berupa penentuan skala prioritas tersebut nantinya akan dilanjutkan menggunakan analisis SWOT.

C. HASIL DAN ANALISIS

1. Potensi Wilayah Pesisir

Wilayah pesisir di Indonesia menyimpan berbagai macam potensi dan kekayaan alam yang ada didalamnya, baik itu berupa potensi SDA, potensi wilayah, potensi industri, potensi pariwisata, dan lain sebagainya. Potensi sumber daya alam wilayah pesisir Indonesia antara lain terdiri atas sumber daya hayati, mineral dan energi, serta potensi budidaya laut. Lautan di Indonesia menyimpan berbagai keanekaragaman hayati, yang terdiri atas berbagai jenis ikan, udang, cumi-cumi, lobster, rumput laut, kerang, terumbu karang, serta jenis-jenis hewan laut lainnya. Hal tersebut juga menyebabkan wilayah pesisir di Indonesia memiliki potensi budidaya laut yang besar. Tidak hanya biota laut, tetapi tanaman mangrove yang tersebar di sekitar pesisir juga dapat turut memberikan manfaat bagi daerah sekitarnya. Wilayah pesisir dan lautan di Indonesia juga menjadi salah satu sumber produksi gas dan minyak bumi yang ada di Indonesia, serta menjadi penyedia berbagai bahan tambang seperti perak, timah, bijih besi, dll (Pebriyanti, 2020).

Wilayah perairan Indonesia berada di kawasan yang dapat dibilang strategis, sehingga hal tersebut dapat menjadi potensi wilayah bagi pesisir Indonesia. Adanya Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) juga memungkinkan Indonesia untuk memiliki hak dan kewenangan penuh atas kekayaan alam lautannya, serta atas pemeliharaan lingkungan kelautannya. Berbagai kekayaan alam juga memungkinkan wilayah pesisir dapat menumbuhkan perekonomiannya melalui perindustrian. Salah satu sumber daya alam yang dapat digunakan dalam perindustrian di wilayah pesisir adalah kawasan mangrove. Hutan mangrove dapat menghasilkan komoditi seperti hasil hutan yang berupa kayu, maupun hasil hutan yang bukan kayu (seperti madu, tanaman obat, bahan makanan, sumber bahan bakar, dll). Selain itu, tanaman mangrove juga dapat dikreasikan menjadi berbagai macam hidangan. Beberapa jenis tanaman mangrove seperti api-api dan munto dapat diolah menjadi makanan seperti tepung, stik manis, cake, dodol, dan pudding (Suditha & Citra, 2014).

2. Masalah Pemanfaatan dan Pengelolaan Wilayah Pesisir

Lingkungan di wilayah pesisir terdiri dari berbagai macam ekosistem yang memiliki perbedaan kondisi serta sifat. Setiap kegiatan pemanfaatan dan pengelolaan di wilayah pesisir secara potensial bisa menjadi sumber kerusakan terhadap ekosistem di wilayah tersebut. Sehingga dengan rusaknya ekosistem bisa juga merusak sumber daya yang ada di dalamnya. Kegiatan pemanfaatan dan pengelolaan wilayah pesisir dilaksanakan oleh masyarakat yang sebagian besar belum memenuhi ketentuan dari pemanfaatan sumber daya alam yang lestari dan berkelanjutan. Sehingga hal ini berdampak pada kondisi dan juga kelestarian di wilayah lingkungan pesisir.

Kerusakan lingkungan yang dapat mengancam kelestarian sumber daya di wilayah pesisir Indonesia, meliputi degradasi habitat secara tidak langsung yang disebabkan oleh pengelolaan sumber daya alam dari hulu yang memberi dampak ke muara pesisir. Konservasi wilayah lindung yang digunakan untuk pembangunan serta reklamasi yang tidak didasari dengan kebijakan dan analisis dampak lingkungan terhadap daerah sekitar dan ekosistem di wilayah pesisir. Over eksploitasi terhadap sumber daya alam di wilayah pesisir.

Selain itu terdapat permasalahan dalam pengelolaan di wilayah pesisir Indonesia, meliputi:

- a. Pemanfaatan ganda melalui keterpaduan dan keselarasan beberapa kegiatan namun tetap harus ditentukan batas kegiatannya. Sehingga hal ini dapat memperkecil atau bahkan menghindari dari adanya perselisihan jangka panjang.
- b. Pemanfaatan tidak seimbang yang terdapat pada persebaran tata ruang nasional. Sehingga hal ini menyebabkan ketimpangan terhadap persebaran penduduk yang disebabkan perbedaan keunggulan komparatif (*comparative advantages*) terhadap keadaan sumber daya di wilayah pesisir Indonesia. Dalam pembangunan nasional, pengembangan wilayah harus memperhatikan kondisi ekologis dan faktor pembatas. Dengan adanya perencanaan yang baik, cermat, dan adil maka perubahan terdapat tata ruang dapat menjadi lebih baik.
- c. Pengaruh kegiatan manusia. Tata perekonomian bagi masyarakat di wilayah pesisir meliputi usaha budidaya perikanan, hasil penangkapan ikan, proses pembuatan garam, hutan rawa yang dimanfaatkan untuk mencari pendapatan, membuat perahu, serta perdagangan dan perindustrian. Seiring dengan tekanan penduduk yang semakin besar maka hal ini akan berpengaruh terhadap kerusakan lingkungan, pencemaran air oleh limbah rumah tangga, erosi yang semakin meluas, kesehatan masyarakat yang semakin memburuk, serta ketertiban dan keamanan umum yang ikut terganggu. Oleh sebab itu, dibutuhkan pengertian dasar mengenai pemanfaatan sumber daya supaya bisa dikelola dengan baik. Karena jika sekali habitat atau ekosistem rusak maka akan sulit sekali untuk diperbaiki.
- d. Pencemaran di wilayah pesisir. Sumber pencemaran yang ada di wilayah pesisir meliputi limbah industri, limbah cair dari pemukiman (*sewage*), limbah cair dari perkotaan (*urban stormwater*), pelayaran (*shipping*), pertanian, serta perikanan budidaya. Bahan-bahan yang biasanya terkandung dalam pencemaran limbah seperti sedimen, pestisida, unsur hara (*nutrient*), logam beracun (*toxic metals*), organisme eksotik, organisme patogen, sampah serta oxygen depleting substances (bahan-bahan larut yang menyebabkan oksigen di dalam air laut menjadi berkurang). Berbagai macam pencemaran dari kegiatan industri, rumah tangga, dan pertanian bisa menyebabkan dampak yang negatif juga terhadap wilayah pesisir seperti dapat merusak ekosistem bakau, terumbu karang, kehidupan berbagai biota di dalam perairan, menghilangkan benih tambak bandeng dan udang, serta bisa menimbulkan abrasi.

Maka berbagai permasalahan yang muncul dalam pemanfaatan dan pengelolaan wilayah pesisir meliputi :

- a. Belum adanya peraturan yang mengatur tentang pemanfaatan dan pengelolaan di wilayah pesisir yang jelas, sehingga membuat wilayah pesisir sulit untuk menetapkan suatu kebijakan.
- b. Pemanfaatan dan pengelolaan wilayah pesisir lebih bersifat sektoral sehingga membuat banyak kebijakan yang tumpang tindih.
- c. Pemanfaatan dan pengelolaan wilayah pesisir belum memperhatikan konsep wilayah pesisir itu sendiri sebagai suatu ekosistem yang tidak memiliki batas terhadap wilayah administratif pemerintah yang bisa menyebabkan konflik kepentingan antar pemerintah daerah.

3. Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu

Supaya bisa mewujudkan pembangunan wilayah pesisir yang berkelanjutan, maka dibutuhkan pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu (*integrated coastal zone management*). Pengelolaan wilayah pesisir bisa dilakukan oleh stakeholders dari lembaga pemerintahan, sektor swasta, sampai organisasi masyarakat yang terlibat dalam kegiatan sehari-hari di wilayah pesisir. Menurut Sorensen dan McCreary (1990) proses yang dilakukan tersebut harus saling berkaitan dan

bersifat dinamis melalui perimbangan dalam aspek sosial, ekonomi, budaya, aspirasi dari masyarakat, serta konflik dalam memanfaatkan sumberdaya dan ruang wilayah pesisir (Putri & Citra, 2018).

Menurut Dahuri et al, (2001) untuk melakukan pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu, meliputi 4 aspek yaitu :

a. Ekologis.

Secara ekologis wilayah pesisir berhubungan antara lahan daratan dan lahan lautan karena pesisir merupakan wilayah pertemuan antara kedua lahan tersebut. Hal ini menyebabkan pengelolaan di wilayah pesisir tidak lepas dari pengelolaan lingkungan kedua lahan tersebut. Dampak lingkungan yang ada pada wilayah pesisir adalah suatu dampak yang muncul karena kegiatan pembangunan di lahan daratan dan lautan. Kegiatan pembangunan yang dilakukan di lahan daratan seperti pemukiman, pertanian, industri pengeboran minyak dan batubara, dan lainnya. Serta kegiatan pembangunan yang dilakukan di lahan lautan seperti aktivitas pengeboran minyak lepas pantai dan aktivitas perhubungan laut. Dalam mengatasi pencemaran dan sedimentasi dari limbah industri tidak bisa dilakukan hanya dari tempatnya saja, namun hal ini harus dimulai dari sumber dampak yang ada. Sehingga pengelolaan yang ada di wilayah pesisir harus terintegrasi dengan pengelolaan di wilayah daratan dan lautan.

b. Sektoral.

Konsekuensi dari besar dan keragaman sumber daya alam di wilayah pesisir yaitu instansi yang banyak serta sektor pembangunan yang berubah dalam aspek pemanfaatan sumber daya di wilayah pesisir. Hal ini membuat tumpang tindih antara satu sektor dengan sektor lainnya dalam pemanfaatan sumber daya di wilayah pesisir. Kegiatan yang mengganggu bahkan mematikan kegiatan antar sektor tersebut tidak dibenarkan, sehingga dibutuhkan penyusunan tata ruang dan panduan dalam proses pembangunan di wilayah pesisir karena untuk menjauhkan dari persamaan antara satu kegiatan pembangunan dengan pembangunan lainnya. Maka pengelolaan wilayah dalam proses perencanaan perlu melakukan integrasi kepentingan bagi seluruh sektor.

c. Disiplin ilmu.

Pengelolaan wilayah pesisir mempunyai sifat dan karakteristik tersendiri yang unik dan spesifik baik dalam ekosistem ataupun sosial budaya masyarakat. Sehingga diperlukan keterpaduan pada disiplin ilmu untuk melakukan pengelolaan di wilayah pesisir berdasarkan karakteristik ekosistem ataupun sosial budaya masyarakat.

d. Stakeholders.

Pengelolaan wilayah pesisir harus dibantu dengan keselarasan antara para pelaku dan pengelola pembangunan di wilayah pesisir yang meliputi pemerintah, masyarakat, sektor swasta, serta lembaga swadaya masyarakat yang mempunyai kepentingannya masing-masing dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya di wilayah pesisir. Sehingga perencanaan pengelolaan pembangunan membutuhkan dua arah pendekatan supaya bisa berhasil diterapkan, yaitu meliputi *top down* dan *bottom up*.

4. Potensi Pariwisata pesisir di Kabupaten Buleleng

Pariwisata alam merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan. Kabupaten Buleleng sendiri menyediakan beraneka ragam sumberdaya laut yang biasanya diasosiasikan dengan tiga "S" (*sun, sea and sand*).

a. Jenis Pelayanan Wisata

Kabupaten Buleleng menyediakan layanan wisata berupa mengamati atraksi lumba-lumba, memancing, diving, dan snorkeling. Lumba-lumba yang terdapat di Kabupaten Buleleng tepatnya di Lovina merupakan salah satu potensi yang memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Selain itu, wisatawan juga dapat menikmati keindahan bawah lautnya dengan diving ataupun snorkeling untuk melihat ikan hias dan terumbu karang, di Desa Pemuteran juga terdapat budidaya terumbu karang yang dikenal dengan Biorock menjadi daya tarik wisata utama. Selain dapat melihat pemandangan pantai dan lautan, wisatawan juga dapat melihat pemandangan gunung jika menghadap ke arah selatan. Wisatawan juga dapat berjalan-jalan di sepanjang pesisir pantai sambil menikmati pemandangan alam yang indah dan dapat berfoto serta menikmati indahnya matahari terbenam (*sunset*).

b. Fasilitas Penunjang Pariwisata

Kabupaten Buleleng tidak ingin tertinggal dengan kabupaten lainnya yang ada di Bali dalam mengembangkan potensi daerahnya terutama dalam bidang pariwisata. Sehingga membuat daerah di Kabupaten Buleleng mulai mengembangkan potensi pariwisata mereka supaya bisa menarik minat para pengunjung untuk datang berwisata ke Kabupaten Buleleng yang berada di wilayah Utara Bali. Melalui pengembangan pariwisata daerah ini memiliki tujuan agar bisa membuat perekonomian masyarakat ikut meningkat. Saat ini Kabupaten Buleleng sudah dapat dikenal sampai ke dunia internasional karena memiliki banyak sekali objek pariwisata yang menarik minat para wisatawan baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara.

Sebagai penunjang kegiatan pariwisata maka dibangun dan dikembangkan berbagai fasilitas dalam mendukung keberlangsungan kegiatan pariwisata yang ada di Kabupaten Buleleng. Salah satu objek pariwisata yang sudah dikenal sampai dunia internasional yaitu terdapat di wilayah pesisir Pantai Lovina yang dibangun berbagai macam fasilitas penunjang pariwisata seperti tempat penginapan, homestay, hotel berbintang, rumah makan. Di wilayah ini juga disediakan tempat bagi para wisatawan yang ingin menyelam atau hanya ingin berkeliling maka disediakan perahu atau jukung. Di Pantai Lovina ini juga disediakan berbagai tempat yang dijadikan sebagai penunjang objek pariwisata yaitu terdapat toko-toko yang menjual souvenir, terdapat pos keamanan, klinik kesehatan, tempat pusat informasi, toilet umum, sampai tempat ibadah.

Sebagai pendukung objek pariwisata di wilayah Kabupaten Buleleng maka dibuat juga sumber daya buatan oleh masyarakat sekitar yaitu terdapat dermaga Pantai Lovina. Dermaga Pantai Lovina ini dibangun dengan tujuan sebagai tempat bersandar kapal-kapal Gross Tonnage atau kapal pesiar dari berbagai negara dan juga perahu jukung milik para nelayan yang dijadikan sebagai kendaraan yang mengantarkan para wisatawan untuk melihat lumba-lumba. Dermaga Pantai Lovina ini juga menjadi aset bagi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Dengan dibangunnya dermaga ini membuat akses lebih mudah bagi para wisatawan untuk datang berkunjung ke Kabupaten Buleleng. Bahkan Dermaga Pantai Lovina ini juga sudah bertaraf internasional yang bisa membantu meningkatkan sektor pariwisata terutama di wilayah Bali Utara.

D. SIMPULAN

Indonesia merupakan negara kepulauan dimana tiga perempat wilayahnya adalah laut. Kondisi ini membawa keuntungan tersendiri bagi Indonesia apabila potensi yang ada di wilayah pesisir dapat dikelola secara maksimal. Namun, pembangunan bidang kelautan selama ini masih jauh dari harapan. Hal yang paling penting untuk dilakukan adalah dengan memperhatikan dan mengoptimalkan sumberdaya wilayah pesisir dan lautan. Kabupaten Buleleng merupakan salah satu contoh yang telah mengupayakan pembangunan dengan memanfaatkan potensi ekosistem pesisir dengan pengembangan destinasi wisata.

DAFTAR REFERENSI

- Arianto, Mukhamad Fredy. "Potensi Wilayah Pesisir di Negara Indonesia." *Jurnal Geografi* 10, no. 1 (2020): 204-215.
- Dewi, A. A. I. A. A. "Model Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat: Community Based Development." *Jurnal Penelitian Hukum p-ISSN 1410* (2018): 5632.
- Lasabuda, Ridwan. "Pembangunan wilayah pesisir dan lautan dalam perspektif Negara Kepulauan Republik Indonesia." *Jurnal ilmiah platax* 1, no. 2 (2013): 92-101.
- Mahi, I. A. K. (2016). *Pengembangan Wilayah: Teori & Aplikasi*. Kencana.
- Panggali, B. L. (2020). Pengembangan Potensi Wilayah Pesisir di Indonesia.
- Yonvitner, S. P., Susanto, H. A., & Pi, S. Pengertian, Potensi, dan Karakteristik Wilayah Pesisir.
- Pebriyanti, N. L. P. E. (2020). A STRATEGI PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS WARISAN BUDAYA DI DAERAH PESISIR BULELENG-BALI. *LOSARI: Jurnal Arsitektur Kota Dan Pemukiman*, 70-81.
- Putri, N. L. P. T. I., & Citra, I. P. A. (2018). Strategi Pengelolaan Sumberdaya Pesisir di Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng. *Jurnal Pendidikan Geografi Undiksha*, 6(1).
- Rahardi, Wira, and Rizal M. Suhardi. "Keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem mangrove di Indonesia." In *Prosiding Symbion (Symposium on Biology Education), Prodi Pendidikan Biologi, FKIP, Universitas Ahmad Dahlan*, vol. 27, pp. 500-510. 2016.
- Sutana, I. G., & Paramita, I. B. G. (2021). Konsep pembangunan pariwisata milenial di kabupaten buleleng. *Genta Hredaya: Media ...*, 5(2). Retrieved from <http://www.jurnal.stahnmpukuturan.ac.id/index.php/genta/article/view/1517>
- Suditha, I. N., & Citra, I. P. A. (2014). Pemetaan Potensi Ekowisata Wilayah Pesisir di Kabupaten Buleleng. *Seminar Nasional Riset Inovatif II, Tahun*, 676-684.
- Waluya, B. (2007). Permasalahan Lingkungan Pesisir dan Laut. *Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Tingkat SMA*, 240-261.

Halaman ini sengaja dikosongkan